



LAPORAN PELAKSANAAN **18 ASPEK SPBE**

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

M E I 2 0 2 4



Kebijakan dan regulasi SPBE (internal)



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;

- Peraturan Gubernur tentang SPBE Nomor 15 tahun 2023
- SK Gubernur Tim Pengelola SPBE Pemprov Sulbar Nomor 19 Tahun 2024 (Tim Koordinasi, Asesor Internal dan Tim Teknis)
- SK Gubernur Tim Pengelola Website Nomor 29 Tahun 2024
- SK Gubernur Tim Pendamping dan Evaluator Nomor 26 Tahun 2024
- SK Gubernur Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nomor: 188.4/7/SULBAR/II/2023
- SK Gubernur Tim Audit SPBE Nomor 553 tahun 2023 (Infrastruktur dan Aplikasi)
- 25 SOP yang sudah tersedia
- SK Gubernur Perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE tahun 2024 (proses pengajuan ke Biro Hukum)
- SK Gubernur Pedoman 8 Manajemen SPBE (proses legalisasi di Biro Hukum)
- SK Gubernur Tata Cara Pembangunan Aplikasi (proses legalisasi di Biro Hukum)
- SK Tim Pengelola SPLP (sedang dalam proses penyusunan)

2

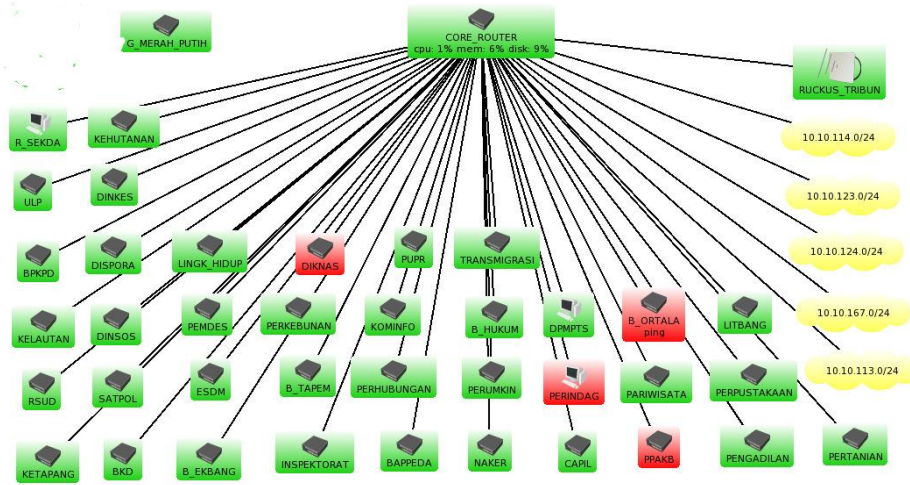
Arsitektur dan peta rencana SPBE



- Arsitektur dan Peta Rencana yang digunakan sudah perubahan versi 3 <https://spbe.sulbarprov.go.id>
- Menjadi panduan operasional penerapan transformasi digital Pemprov yang terintegrasi
- Dokumen arsitektur bersifat dinamis dan dikelola dalam aplikasi
- Terhubung dan sinkron dengan arsitektur SPBE Nasional melalui aplikasi SIA versi 2.0 KemenpanRB
- Penyelarasan metadata terhadap perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan Pemprov. Perlu reviu metadata OPD untuk penyesuaian dan peningkatan kualitas sistem dan proses bisnis yang lebih sederhana
- Perlu reviu materi Peta Rencana yang lebih operasional pada seluruh aspek pengembangan SPBE yang dikerjakan oleh Tim Koordinasi.
- Dikerjakan bersama dengan pendampingan CfDS UGM

3

Infrastruktur jaringan intra



Access point
min. 3 unit



Provinsi

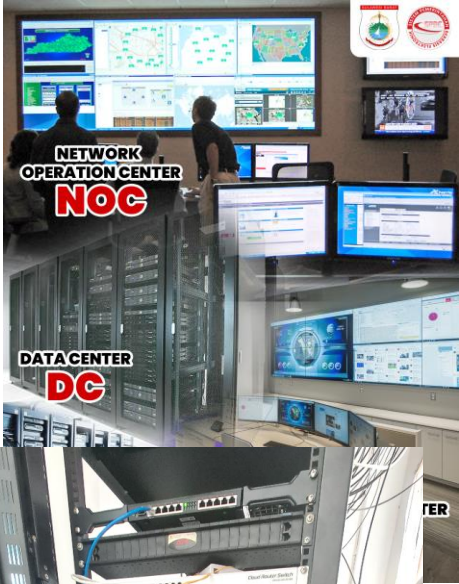
- Terkoneksi 39 OPD & 7 rjab, total 35 Gedung (- RSUD dan Badan Penghubung Jakarta)
- Seluruh gedung dalam Kompleks Perkantoran Gubernur telah terkoneksi jaringan kabel FO
- Perlu pembangunan koneksi digital antar Pemprov dengan 6 Pemkab
- Dibutuhkan pembangunan monopole tower untuk perluasan jaringan wireless dalam kompleks Gubernur

OPD

- 39 OPD sudah memenuhi standar perangkat jaringan
- 2 OPD yang BELUM Memenuhi Standar Teknis Perangkat Jaringan Intra: DUKCAPIL dan BPBD

4

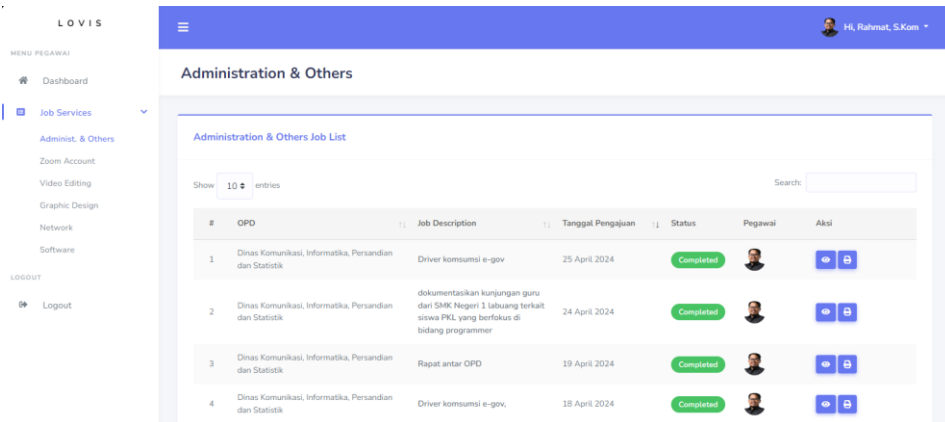
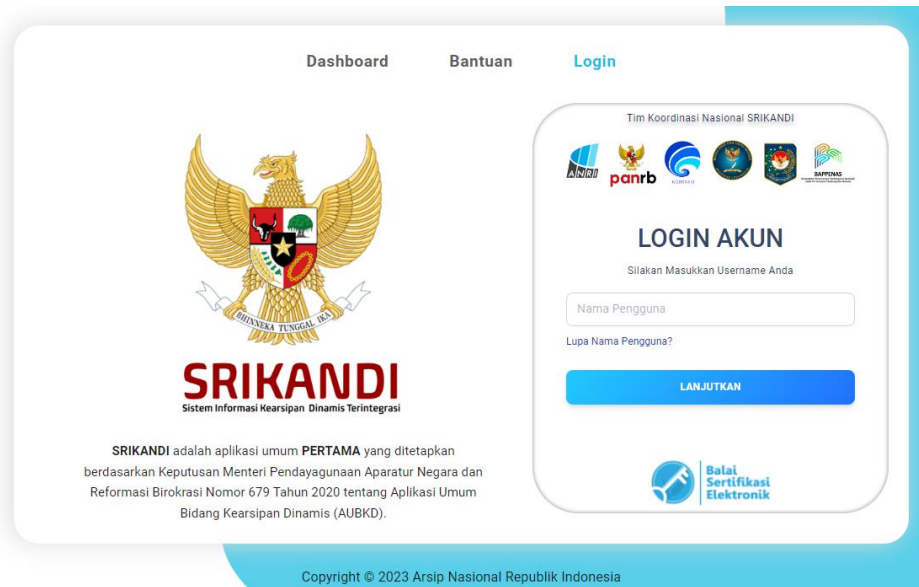
Pusat Data (DC, NOC, SOC & DRC)



- Jumlah server pada data center Dinas Kominfo 23 Unit Kapasitas 110,10 TB
- Jumlah server yang tersebar pada Gedung OPD: 17 Unit Kapasitas 20,4 TB (BPKPD, Biro Barjas, BPBD, RSUD, Dukcapil dan ESDM)
- Ruangan Data Center (DC) berada di lantai 1 Gedung Utama Kantor Gubernur
- Ruangan Network Operation Center (NOC) berada di lantai 2 Gedung Utama Kantor Gubernur
- Ruangan Disaster Recovery Center (DRC) berada di lantai 4 Gedung Gabungan Dinas
- Direncanakan ruangan Security Operation Center (SOC) berada di kantor Dinas Kominfo
- Menjadikan ruang *Disaster Recovery Center* (DRC) di lantai 4 Gedung Gadis

5

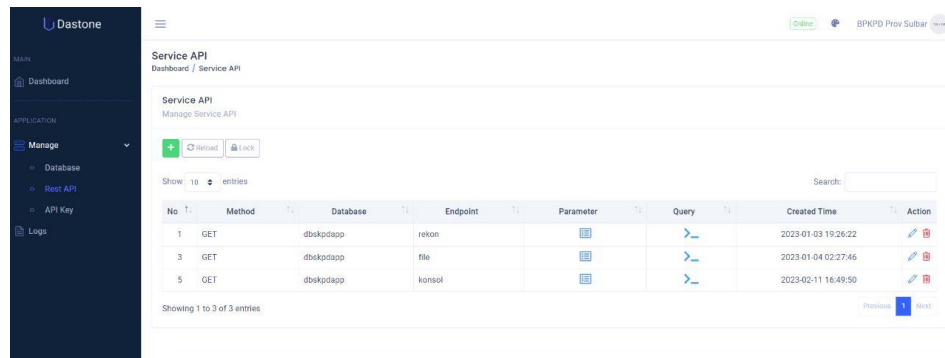
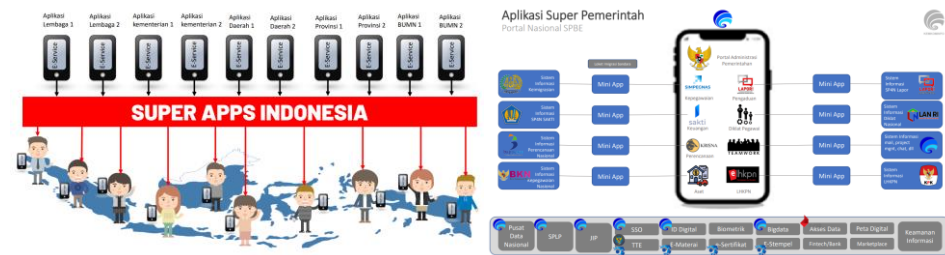
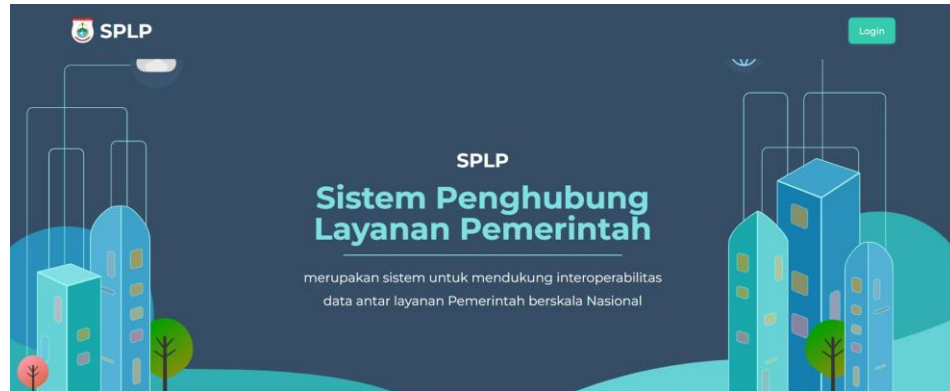
Aplikasi/Sistem Informasi



- Aplikasi aktif
 - 4 Aplikasi Umum
 - 80 Aplikasi khusus pada 21 OPD
- Aplikasi terdiri dari 2 Jenis:
 - Internal (server lokal) : 32 Aplikasi
 - Eksternal (server luar) : 52 Aplikasi
- Meminimalkan jumlah aplikasi dan memaksimalkan fungsi/fitur pada setiap aplikasi pendukung urusan (1 urusan 1 aplikasi)
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi dikerjakan dengan pola *inhouse developer* SPBE (pembangunan aplikasi terpadu secara mandiri) bekerjasama dengan professional IT

6

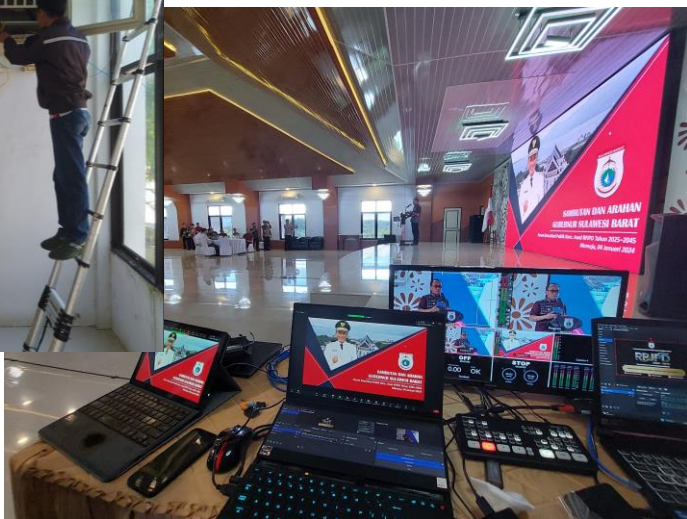
Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)



- Aplikasi yang saling terhubung:
 - Sipamandar-ekoreksi
 - SIMRS-Whatsappbot
 - Sipamandar-BPD Sulselbar
 - SAPOTA-Portal Satu Data Indonesia
- Pembangunan dan integrasi aplikasi akan dikerjakan berdasarkan peta rencana SPBE
- Memaksimalkan keterhubungan antar aplikasi dengan menggunakan 2 kanal SPLP, yaitu:
 - SPLP Nasional : splp.layanan.go.id
 - SPLP Internal : splp.sulbarprov.go.id
- SPLP internal dikerjakan bersama CfDS UGM

8

SDM SPBE



Provinsi

- GCIO 1 orang
- Manager/Analisis 4 orang
- Programmer 5 orang
- Jaringan 5 orang
- Multimedia 5 orang
- Helpdesk 3 orang

Perlu penambahan kuantitas dan kualitas personil SDM teknis SPBE Pemprov

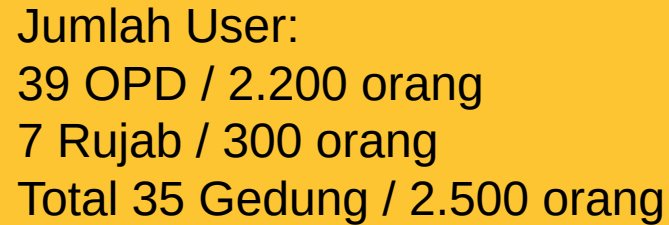
OPD

Setiap OPD memiliki 6 tenaga teknis, antara lain:

- Manajer Teknis
- Admin Aplikasi
- Admin Web
- Admin Jaringan
- Desain Grafis
- Video Editor

Perlu penambahan kuantitas dan kualitas personil SDM teknis SPBE OPD

Internet



Max. :	1.800	Mbps
Avg. :	1.200	Mbps
Min. :	500	Mbps

Penyedia bandwidth 3 provider:

- Telkom: 100 Mbps dedicated
100 Mbps Asti Lite dedicated
up to 1.800 Mbps broadband
- Icon+: up to 500 Mbps broadband
100 Mbps dedicated
- Julianet: 100 Mbps dedicated
Up to 1.000 Mbps broadband

Total Bandwidth :

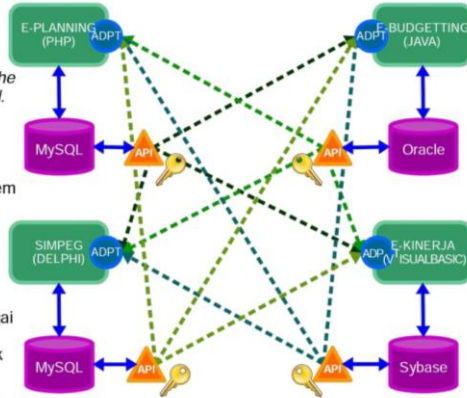
3.700 Mbps

SOLUSI INTEGRASI DENGAN KONSEP INTEROPERABILITAS

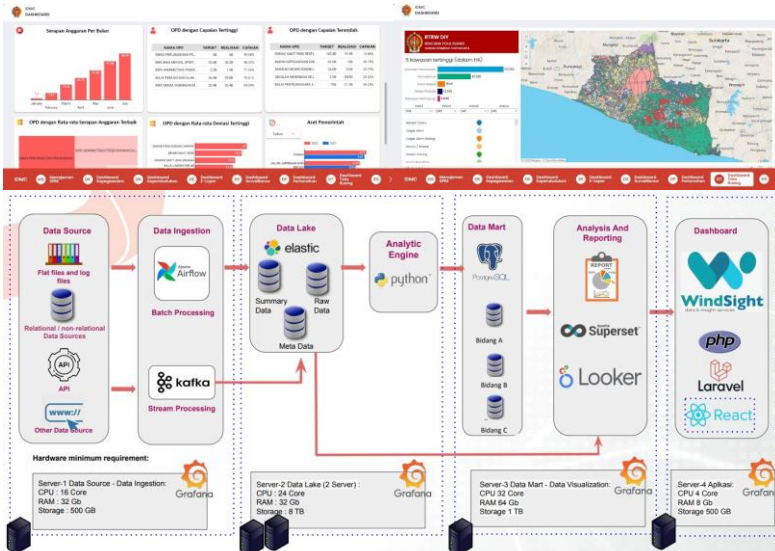
IEEE Glossary:
Interoperability is the ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged.

INTEROPERABILITAS:
Kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagi pakai data/informasi.

API:
Application Programming Interfaces adalah aplikasi yang berfungsi sebagai penyedia layanan penghubung informasi data antar sistem elektronik menggunakan teknologi Web Services. Dan diakses melalui kunci akses per fungsi layanan.



- Tata kelola data digital menggunakan aplikasi Satu portal data (SAPOTA) berbasis web
- Aplikasi mengintegrasikan data statistik dan data spasial
- Aplikasi mengintegrasikan data kabupaten dan mendukung Satu Data Nasional
- Koneksi data digital antar aplikasi akan difasilitasi oleh SPLP untuk menyajikan informasi *realtime*
- Akan dikerjakan sesuai rekomendasi peta rencana SPBE
- Mengoptimalkan *cloud computing*
- Memfasilitasi terwujudnya arsip digital dengan *virtual office*
- Mewujudkan dashboard informasi eksekutif berbasis big data analitik



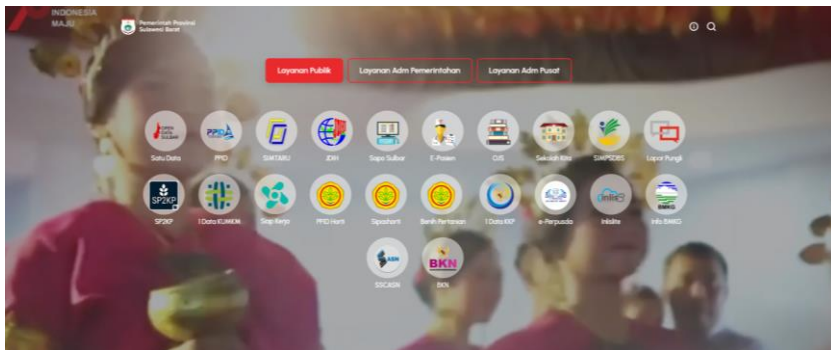
Integrasi portal akses aplikasi layanan



Website Utama



Website Pemerintah Kabupaten



- Integrasi portal pada halaman : sulbarprov.go.id
 1. Website (1 web pemprov, 6 web kabupaten dan 41 web OPD)
 2. Aplikasi :
 - Layanan Publik :
 - Layanan Administrasi Pemprov
 - Layanan Administrasi Pusat
 3. Medias sosial resmi :
 - Instagram (1 akun pemprov dan 41 akun OPD)
 - Facebook (1 akun pemprov dan 41 akun OPD)
 - Youtube (1 akun pemprov dan 41 akun OPD)
 - Tiktok (1 akun pemprov dan 41 akun OPD)
 4. Galeri Inovasi (Pemprov dan Pemkab)
- Portal integrase layanan Pemprov Sulbar akan menjadi mini app dalam desain integrase SPBE Nasional (Super App)
- Akan dikembangkan akses dengan sistem SSO (Single Sign On) berbasis :
 - Publik menggunakan NIK
 - ASN menggunakan NIP
- Selain SSO, juga akan dibangun keterhubungan sistem dan data menggunakan SPLP Nasional dan SPLP Internal



SOPHOS XG 330



- Jaringan dan data digital masih sering mendapat serangan siber
- Telah diadakan alat firewall sebagai benteng pertahanan keamanan jaringan dan data
- Intensifikasi koordinasi teknis Web Administrator Pemprov dan OPD
- Menambah perangkat firewall
- Meningkatkan sistem keamanan dengan penguatan peran CSIRT dan kerjasama BSSN

Pemanfaatan SRIKANDI dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

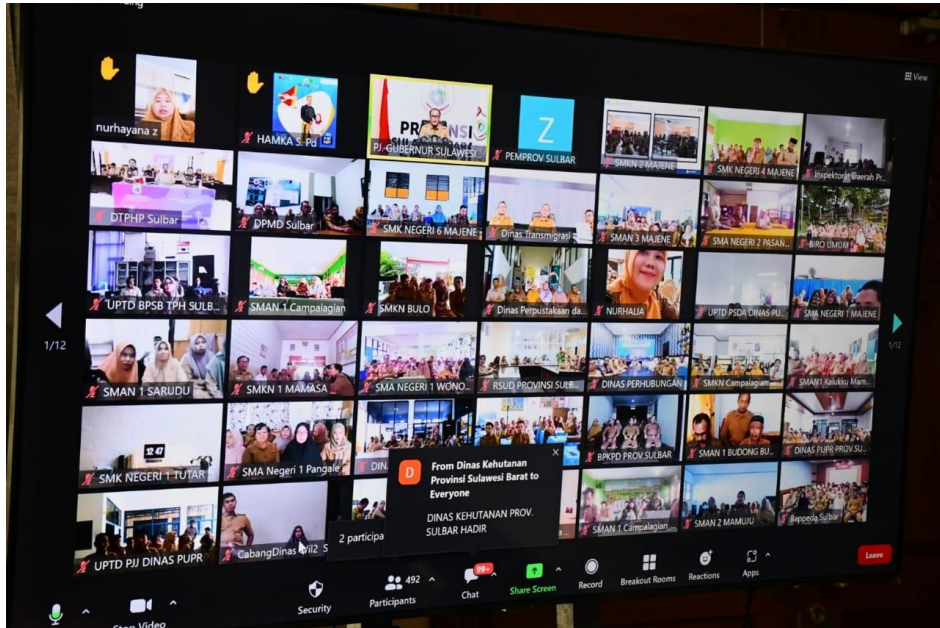


- Jumlah Sertifikat Elektronik (TTE) yang sudah diterbitkan dengan fasilitasi Dinas Kominfo 1.310 sertifikat
- Jumlah e-mail go.id yang dibuat untuk OPD dan ASN (dukungan TTE) 2.483 e-mail
- Capaian transaksi aplikasi persuratan dan kearsipan SRIKANDI Peringkat ke-2 nasional
 - 171.910 naskah masuk
 - 160.840 naskah keluar
 - 127.079 disposisi
 - 5 kabupaten live



14

Penggunaan Virtual Meeting



- Penggunaan akun virtual zoom meeting
 - 2 akun @100 partisipan
 - 1 akun 500 partisipan
 - 1 akun 1000 partisipan
- Penggunaan padat (apel rutin, webinar series & inovasi, kegiatan hybrid & rapat-rapat)
- Disedikan fasilitas streaming dan broadcasting untuk kegiatan Pemprov dan OPD



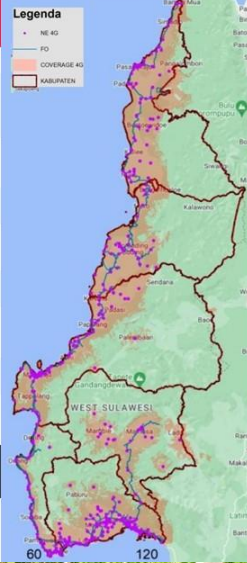
Blank spot area internet desa

DATA CAKUPAN SIGNAL SELULER 4G SAMPAI SEPTEMBER TAHUN 2023 WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

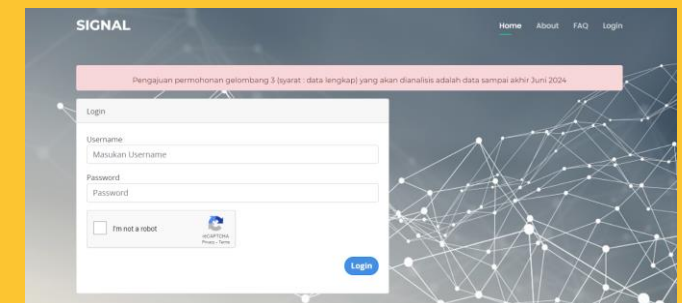
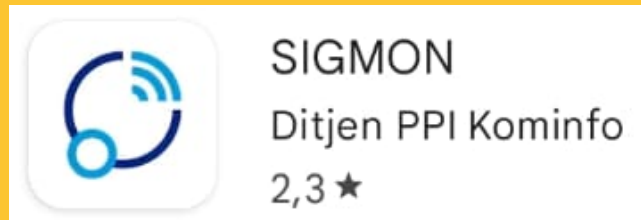
No	Kabupaten	Luas cakupan 4G wilayah (%)	Luas cakupan 4G Pemukiman (%)	Jumlah Desa & Kel
1	Pasangkayu	88	95	63
2	Mamuju Tengah	85	98	55
3	Mamuju	67	84	101
4	Majene	82	95	82
5	Polewali Mandar	84	84	167
6	Mamasa	80	89	181
Total Cakupan Sulbar (%)		81	91	649
Total Blank spot (%)		19	9	50

Sumber Data: DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA, KEMENKOMINFO RI
Diolah: DINAS KOMINFO PROV SULBAR

PETA CAKUPAN JARINGAN INFRASTRUKTUR DIGITAL



- Bantuan internet desa dari Pemprov Sulbar 2019 - 2023:
Kabel FO : 61 desa
VSAT : 10 desa
- Pemprov telah mendorong seluruh pemerintah desa untuk melaporkan data titik blankspot kepada Kemenkominfo untuk dimintakan bantuan pada aplikasi: **Signal.go.id**
- Pemprov juga mendorong seluruh pemkab untuk mengusulkan bantuan pembangunan infrastruktur jaringan internet kepada Kemenkominfo melalui aplikasi: **signal.kominfo.go.id**



Perencanaan & Penganggaran SPBE



2024

Provinsi

Anggaran SPBE provinsi Rp. 4,2 M

- Penyediaan fasilitas pusat data
- Penyediaan internet terpadu 3.700 Mbps
- Pembiayaan kerjasama CfDS UGM untuk pendampingan pembuatan kebijakan SPBE dan pembangunan SPLP internal
- Pengembangan SDM pengelola TIK
- Fasilitas tata kelola dan manajemen SPBE Provinsi
- Penyediaan lisensi aplikasi pendukung tata kelola SPBE

OPD

Tidak seluruh OPD mengalokasikan pembiayaan SPBE

2025

Provinsi

Dibutuhkan anggaran SPBE Provinsi Rp. 12 M

- Penyediaan jaringan intra penghubung pemprov ke pemkab
- Peningkatan infrastruktur Data Center
- Penyediaan internet terpadu 3.700 Mbps
- Pembiayaan tenaga ahli IT Support SPBE
- Pengembangan SDM pengelola TIK
- Fasilitas internet desa
- Fasilitas tata kelola dan manajemen SPBE Provinsi
- Penyediaan lisensi aplikasi pendukung tata kelola SPBE
- Fasilitas peralatan kerja Tim Teknis SPBE
- Penyediaan perangkat dan perawatan peralatan Command Center
- Kegiatan pendampingan literasi digital masyarakat
- Pengembangan program “provinsi cerdas”

OPD

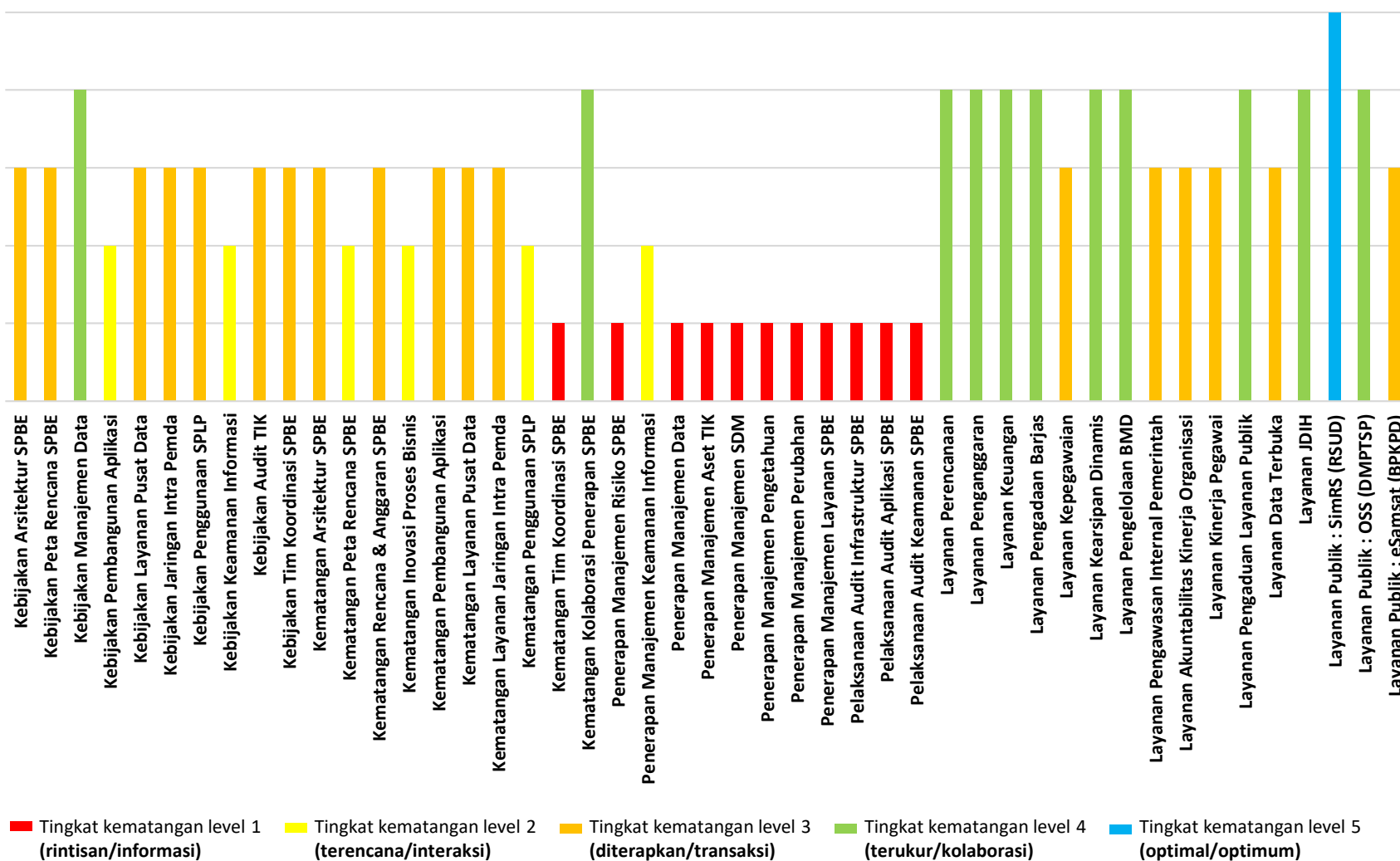
- Direkomendasikan biaya SPBE Rp. 100 juta per OPD, untuk:
 1. Insentif SDM pengelola
 2. Penyediaan atau pemeliharaan perangkat jaringan
 3. Penganggaran untuk penunjang aktifitas tata kelola dan manajemen SPBE

SPBE Pemprov Sulbar 2023

KepmenPAN Nomor 13 Tahun 2024



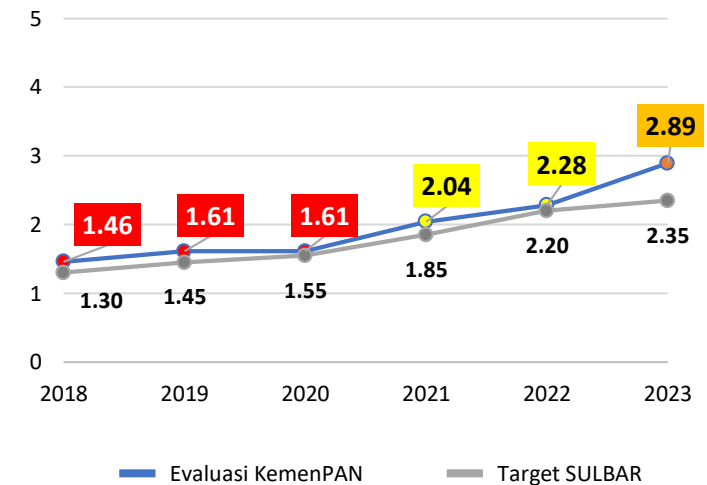
Capaian SPBE 47 Indikator



**INDEKS :
2,89 (BAIK)**

domain kebijakan : 2.90
domain tata kelola : 2.60
domain manajemen : 1.09
domain layanan : 3.69

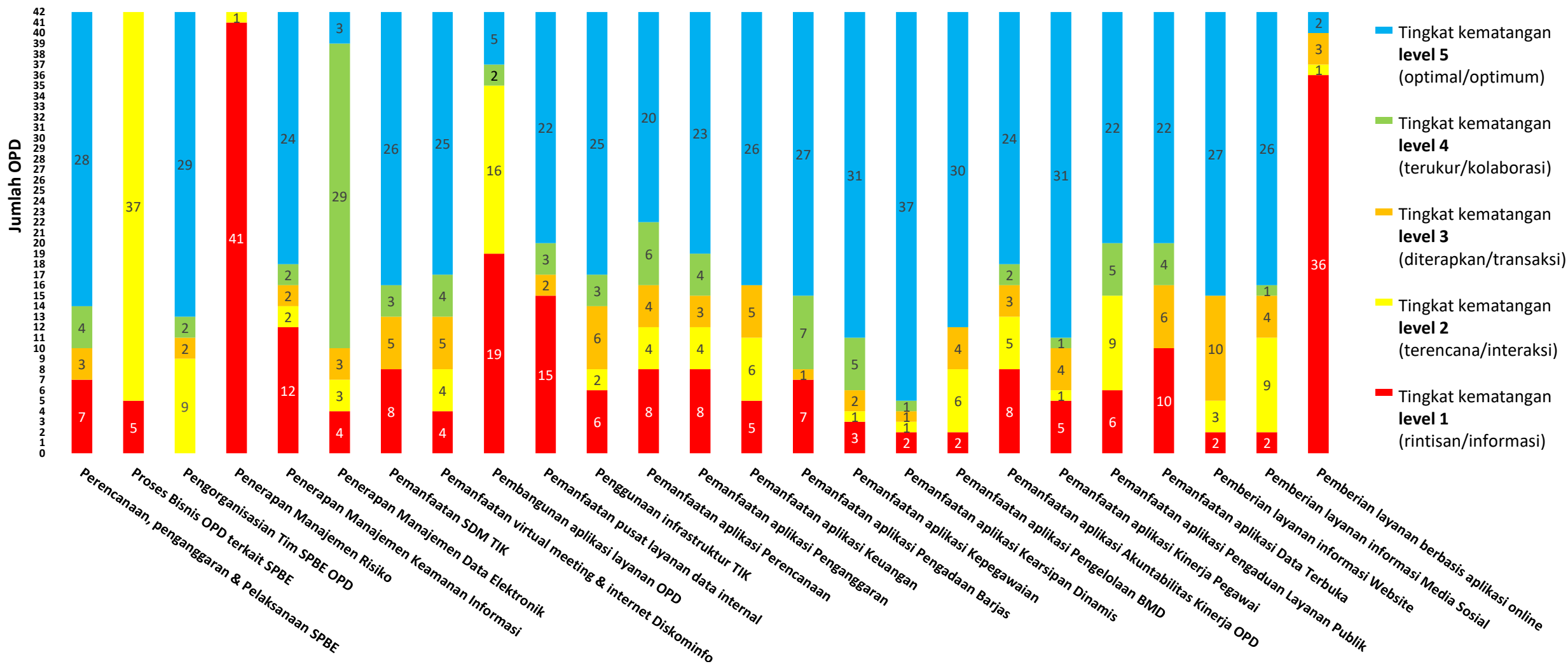
Peningkatan Indeks SPBE Sulbar



Urutan indeks SPBE Provinsi 2023



Capaian SPBE OPD 25 Indikator



Indeks SPBE OPD 2023

SK Gubernur Sulbar Nomor 780 Tahun 2023



MEMUASKAN (4,2 – < 4,2)

1	BPKPD	4.54
2	Diskominfo	4.46
3	DPM-PTSP	4.46
4	RSUD	4.46
5	BKD	4.34
6	Biro Hukum	4.28
7	Biro Umum	4.22
8	BAPPEDA	4.20
9	Biro Ortala	4.20
10	Biro Barjas	4.20
11	DKP	4.20
12	Dinas Kesehatan	4.20
13	Dinas Perpustakaan & Arsip	4.20
14	Inspektorat	4.20
15	Satpol PP & Damkar	4.20

SANGAT BAIK (3,5 – < 4,2)

1	Dinas Perhubungan	4.16
2	Dinas Kehutanan	4.14
3	Dinas Pariwisata	4.12
4	DLH	4.10
5	Biro Ekbang	3.98
6	Dinas Perkebunan	3.80
7	Dinas Ketapang	3.68
8	Dispora	3.62

BAIK (2,6 – < 3,5)

1	BPSDM	3.44
2	Dinas DIKBUD	3.42
3	Dinsos	3.26
4	DTPHP	3.20
5	Disdukcapil	3.16
6	Dinas PUPR	2.86
7	Balitbang	2.72
8	Badan Kesbangpol	2.68

CUKUP (1,8 – < 2,6)

1	Disnaker	2.48
2	Disperinkop & UKM	2.46
3	Dinas ESDM	2.34
4	Sekretariat DPRD	2.34
5	Disperumkin	2.22
6	Badan Penghubung	2.16
7	Dinas P3APP & KB	2.06
8	Biro Pemkesra	1.92
9	BPBD	1.88
10	Dinas Transmigrasi	1.82
11	DPMD	1.80

*Indeks diperoleh dari hasil evaluasi SPBE OPD 25 indikator pada 3 domain (Manajemen, Tata kelola & Layanan) berdasarkan SK Gub No. 188.4/478/SULBAR/XII/2022

Kendala Transformasi Digital Menuju SPBE Terintegrasi Pemprov Sulbar



**Digital Mindset
penyelenggara
pemerintahan
masih kurang**



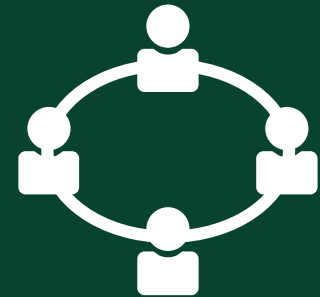
**SPBE belum
menjadi prioritas
kebijakan dan
kurang
diperhatikan para
pimpinan**



**Keterbatasan
pengalokasian
anggaran untuk
pelaksanaan
digitalisasi**



**Kurangnya
kualitas dan
kuantitas SDM
TIK serta tidak
fokusnya
pekerjaan tenaga
yang ditunjuk**



**Ego sektoral
masih tinggi dan
sinergitas antar
stakeholder
belum optimal**



**Setiap rencana pengembangan SPBE OPD
disemua aspek agar dikoordinasikan
ke Diskominfo selaku leading sektor SPBE untuk
dikonsolidasikan dengan arsitektur dan peta
rencana SPBE Pemprov. Sulbar agar
pembangunan ekosistem digital dapat
terintegrasi secara konsisten, efisien dan terarah**

Usulan Anggaran Optimalisasi SPBE Pemprov. Sulbar
pada Dinas Kominfo Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Nilai
1	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1,474,389,234
2	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegras	875,314,843
3	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	459,304,056
4	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,500,578,335
5	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	444,914,160
6	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	820,329,000
7	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	140,854,560
8	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	246,695,400
9	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	152,935,400
10	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1,100,464,192
11	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1,609,406,368
12	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	392,237,000
13	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	2,252,754,100
14	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	430,919,051

Total11,901,095,698



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

“
Sulbar
Bahagia

Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si
Pj. Gubernur Sulawesi Barat